

## ABSTRAK

Untuk menjamin tertib administrasi, efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi maka kegiatan penyusutan arsip harus dilaksanakan di setiap perangkat daerah yang nota bene sebagai pencipta arsip. Tidaklah mungkin setiap pencipta arsip terus menerus mencipta arsip tanpa diimbangi dengan kegiatan pengurangan arsip yang tercipta. Kegiatan pengurangan arsip ini lazim disebut sebagai salah satu proses kegiatan penyusutan arsip di dunia Arsip Daerah. Penelitian ini meneliti tentang proses penyusutan arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah provinsi Jambi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses pengaturan penyusutan arsip guna peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia, termasuk di dalamnya faktor pendukung dan penghambatnya, serta kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan penyusutan arsip. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaturan penyusutan arsip dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi Jambi melalui beberapa indikator: a) indikator kinerja kebijakan; b) indikator kinerja program; c) indikator kinerja kegiatan; d) laporan audit *internal* Arsip Daerah (LAKI), laporan audit Arsip Daerah *eksternal* (LAKE); dan e) proses evaluasi melalui *input*, *output* dan *impact*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif tentang pengaturan penyusutan arsip guna peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini dapat disampaikan bahwa penyusutan arsip di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah provinsi Jambi belum optimal dikarenakan: hambatan / kendala kegiatan penyusutan arsip diantaranya adalah factor P3D (Prasarana dan sarana, Pembiayaan/anggaran Arsip Daerah, Pengelolaan yang belum maksimal, Dokumen/penyimpanan arsip, kepedulian pimpinan yang masih kurang, Regulasi/Kebijakan penyusutan arsip yang belum ada/belum lengkap di pemerintah daerah yang belum lengkap, Sumber daya manusia terutama kurangnya jumlah arsiparis dan kemampuan para pengelola arsip yang masih perlu ditingkatkan lagi. Perlu untuk Mengoptimalkan faktor P3D ( Pembiayaan, Personalia, Prasarana baik dari segi kualitas dan kuantitas ,) dan Penumpukan Dokumen , efisiensi penyimpanan dokumen, pembinaan dan bimbingan teknis Arsip Daerah bagi pejabat struktural/arsiparis/pengelola arsip terkait penyusutan arsip

**Kata kunci :** Penyusutan arsip, Optimalisasi , Kinerja